



LKJIP 2026

TRIWULAN II

02 Juli 2026



Disperkim
Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kel. Sei Pangeran
Kec. Ilir Timur I Kota Palembang



KATA PENGANTAR

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan administrasi selama Tahun Anggaran 2026 baik kegiatan rutin maupun kegiatan fisik yang dana kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dituangkan ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai turunan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang utuh dan memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk menyiapkan pertanggung jawaban kinerja kepada Gubernur Sumatera Selatan;
2. Laporan Kinerja merupakan bahan untuk saran evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai target dan capaian kinerja Tahun Anggaran 2026 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun Anggaran 2026 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026. Pencapaian sasaran kinerja, merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selain dimanfaatkan untuk perbaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya untuk pemenuhan visi dan misi yang telah digariskan di dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan juga unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pekerjaan Umum Keciptakarya, wajib menyampaikan LKjIP secara teratur, jelas dan tepat waktu. Format penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir Kata, kami mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 02 Juli 2026

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan**



Ir. H. Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN Eng
Pemerintah Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar/Grafik	vii
Daftar Lampiran	x
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan	1
1.3 Permasalahan Utama	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	5
1.5 Susunan dan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	6
 II. PERENCANAAN KINERJA	 9
2.1 Telaahan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kepala Daerah Sumatera Selatan	9
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	11
2.3 Pohon Kinerja	13
2.4 Perjanjian Kinerja	13
 III. AKUNTABILITAS KERJA	 19
A. Definisi Operasional	19
B. Capaian Kinerja	20
1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	22
2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun 2023, 2024 dan 2025	23



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026	35
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Standar Nasional	35
5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative Solusi.....	36
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	42
C. Realisasi Anggaran	47
IV. PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Klasifikasi Berdasarkan Unit Kerja	6
1.2 Klasifikasi Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)	6
1.3 Klasifikasi Berdasarkan Esselon	7
1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
1.5 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan PPPK.....	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	11
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Perubahan.....	14
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	15
3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja	20
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	21
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	22
3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	35
3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.....	35
3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	38
3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	39
3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran ..	40
3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	40
3.10 Persentase Efisiensi Biaya Program yang Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2025.	41
3.11 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan	

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	48
3.12 Realisasi Keuangan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	49

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Grafik	Hal
3.1 Kinerja Akses Air Minum Layak Tahun 2025	23
3.2 Perbandingan Target Akses Air Minum Layak Tahun 2023, 2024, 2025, 2026	23
3.3 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023, 2024, 2025 2026	24
3.4 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	25
3.5 Kondisi Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak RPD 2024- 2026 Provinsi Sumatera Selatan	26
3.6 Capaian Akses Air Minum Layak pada Target Nasional.....	27
3.7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025.....	27
3.8 Perbandingan Target Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 dan Tahun 2025	28
3.9 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 dan Tahun 2025	28
3.10 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024	29
3.11 Kondisi Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak RPJMD 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan	30
3.12 Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Pada Target Nasional.....	31
3.13 Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaasi.....	32
3.14 Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaasi terhadap Akhir Periode RPJMD	32
3.15 Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaasi Pada Target Nasional.....	33
3.16 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.....	33

3.17 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan pada Akhir Periode RPJMD.....	34
3.18 Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan pada Target Nasional.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja
- Lampiran 3 : Pohon Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 4 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat pada Pasal 28 H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Negara Indonesia secara umum dan Pemerintah Indonesia secara khusus untuk mengutamakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, prasarana, dan utilitas umum sebagai penunjang kehidupan masyarakat dalam rangka mensejahterakan hidup masyarakat.

Dalam penyelenggaraan program tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemegang hak otonomi daerah di Indonesia berupaya menjalankan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan mempertimbangkan azas yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah azas akuntabilitas. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan keciptakaryaan. Sebagai landasan formal dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta merupakan pelaksanaan dari penerapan azas akuntabilitas, maka diupayakan untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Substansi dari sistem AKIP yang harus diupayakan untuk dibangun atau dikembangkan adalah melalui penyusunan dan pelaksanaan perencanaan strategis, pengukuran dan evaluasi kinerja yang terukur serta pelaporannya. Sebagai bentuk pelaksanaan azas akuntabilitas tersebut, dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Permenpan No. 53 Tahun 2014.

1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka secara umum isu-isu strategis yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi gedung dan bangunan sarana milik pemerintah daerah yang sebagian besar

dalam kondisi rusak dan tidak layak dan tidak sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Serta Inventarisasi data kondisi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi yang sebagian dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai;

2. Masih rendahnya cakupan layanan air minum regional lintas kabupaten/kota dan penyediaan air minum non perpipaan terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air baku yang layak;
3. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan drainase permukiman masih banyak yang tidak layak, sehingga mengakibatkan genangan air di musim hujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam aktivitas ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan;
4. Jumlah kawasan yang memiliki sanitasi layak masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap lingkungan yang layak huni sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kawasan kumuh;
5. Penanganan persampahan belum dilaksanakan mulai dari sumbernya, baik masyarakat maupun petugas dan instansi pengelola sampah. Hal ini juga dikarenakan belum tersedianya TPA Regional di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Penanganan kawasan kumuh yang masih penuh dengan tantangan dengan minimnya dukungan masyarakat untuk menciptakan kawasan layak huni;
7. Melakukan Program 3 Juta Rumah yang merupakan Program Strategis Nasional;
8. Meningkatkan keterkaitan dan kerjasama lintas kabupaten/kota;
9. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyelesaian batas wilayah, pemekaran wilayah, dan penyelesaian konflik lahan;
10. Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk, penataan kawasan dan lingkungan ruang publik dan kawasan strategis provinsi masih banyak yang belum terlaksana dengan baik sehingga di butuhkan penataan dan pengembangan dan pembangunan kawasan (site development);
11. Melaksanakan pembangunan gedung dan bangunan provinsi strategis;
12. Mendukung Prioritas Pembangunan Kewilayahan pada dokumen RPJMN sesuai dengan highlight intervensi dan lokasi prioritas yang ditetapkan RPJMN, seperti :
 - Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang
 - Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin
 - Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin
 - Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi Pekerja, MBR, Gen Z dan Milenial di WM Palembang (PHTC)
13. Mengembangkan inovasi daerah dari segi regulasi, teknologi dan ketersediaan aplikasi

informasi layanan di bidang keciptakaryaan dan perumahan permukiman berbasis elektronik;

14. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah akibat bencana dan relokasi pemerintah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga harus berkolaborasi dengan pusat untuk pembangunan rumah layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini merupakan Standar Pelayanan Minimal untuk masyarakat untuk dapat hidup yang layak serta bekerjasama dengan BAZNAS untuk mencari sumber Pendanaan Penyediaan perumahan;
15. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau serta penyediaan lahan untuk perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini karena masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 merupakan cara untuk mencapai strategi yang telah ditentukan, dimana setiap strategi memiliki lebih dari satu kebijakan, dengan total 17 arah kebijakan. Berikut beberapa arah kebijakan yang bersifat strategis dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni;
2. Pembinaan dan Pengawasan kepada Kabupaten/Kota untuk penerbitan update SK Kumuh Kabupaten/Kota secara berkala;
3. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum meliputi jalan lingkungan, drainase, air limbah, air minum, pembuangan sampah;
4. Pendataan dan pengidentifikasian korban bencana;
5. Peningkatan infrastruktur SPAM, perbaikan kualitas air;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air melalui perpipaan maupun non perpipaan;
7. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
8. Pembangunan MCK pada setiap rumah atau per Kepala Keluarga;
9. Pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat;
10. Pembangunan infrastruktur dasar yang layak dan terawat termasuk persampahan, air minum dan air limbah yang berada pada kawasan strategis provinsi;
11. Ketersediaan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
12. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;

13. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penjenjangan sertifikasi keahlian;
14. Diterbitkannya juknis yang mengatur tentang program kegiatan sertifikasi pengembang perumahan;
15. Peningkatan kualitas pelayanan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
16. Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel;
17. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

1.3 Permasalahan Utama

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Dapat ditarik kesimpulan secara garis besar beberapa permasalahan antara lain :

1. Penanganan jalan lingkungan, dan drainase belum maksimal di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. Rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, dan daerah rawan air dan belum ada capaian terhadap penanganan air minum lintas kabupaten/kota yang dikarenakan kondisi jarak antara kabupaten/kota yang cukup jauh dan belum padat penduduk;
3. Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage), limbah regional dan persampahan regional hal itu dapat menyebabkan pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah;
4. Masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung;
5. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah, serta semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah menyebabkan semakin luasnya kawasan kumuh perkotaan, serta Sifat extended family (keluarga besar) pada sebagian besar permukiman kumuh mengakibatkan dampak pada pemanfaatan ruang yang sangat semrawut di dalam rumah, untuk menampung penambahan jumlah anggota keluarga maka dibuat penambahan-penambahan ruang serta bangunan yang asal jadi, akibatnya kondisi rumah secara fisik menjadi tidak layak fungsi dan tidak layak huni;
6. Terbatasnya kewenangan provinsi pada skala 10-15 Ha yang terdapat pada SK

- Kumuh masing-masing kabupaten/kota;
7. Terbatasnya jumlah SDM jasa konstruksi;
 8. Tidak terjadi bencana skala provinsi yang ditetapkan oleh SK Kepala Daerah sebagai bencana provinsi;
 9. Masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah lebih memilih ganti uang dari pada relokasi di kawasan permukiman yang baru;

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Fungsi

Adapun Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi, dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur,
- b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- c. Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota,
- d. Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air,
- e. Penyelenggaraan penyediaan dukungan atau bantuan untuk kerja sama antar kabupaten atau kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- f. Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program,
- g. Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi,
- h. Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi,
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik

negara/daerah,

- j. Pembinaan administrasi, kepegawaian, dan unit pelaksanaan teknis,
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.5 Susunan dan Struktur Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 berjumlah **225 (dua ratus dua puluh lima)** orang Aparatur Sipil Negara yang diklasifikasikan berdasarkan unit kerja, pangkat (golongan/ruang), eselon, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3, dan Tabel 1.4.

a. Jumlah Aparatur Sipil Negera Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 1.3 Klasifikasi Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1.	Sekretariat	14	14	9	11	48
2.	Bidang Pengembangan Kawasan P	13	15	4	13	45
3.	Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	17	9	8	4	38
4.	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	11	8	6	36
5.	UPTD PIP2B & Jasa Konstruksi	8	5	3	5	21
6.	Bidang Perumahan	9	10	11	7	37
	Jumlah	72	64	43	46	225

b. Jumlah Aparatur Sipil Negera Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

Tabel 1.1 Klasifikasi Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

No.	Golongan	Laki-Laki				Perempuan				Jumlah
		A	B	C	D	A	B	C	D	
1.	Golongan IV	8	4	3	0	7	0	0	0	22
2.	Golongan III	6	10	8	20	4	14	3	8	73
3.	Golongan II	0	0	2	1	0	0	0	1	4
4.	Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PPPK	74				52				126
	Jumlah	136				89				225

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Esselon

Tabel 1.2 Klasifikasi Berdasarkan Esselon

No.	Esselonering	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1	0	1
2.	Esselon III	3	1	4
3.	Esselon IV	13	5	18
	Jumlah	17	6	23

d. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1.	S3	1	0	0	0	1
2.	S2	18	0	9	0	27
3.	S1	35	49	24	33	141
4.	Profesi Insinyur	1	0	1	0	2
5.	D4	0	1	1	2	4
6.	D3	3	6	1	7	17
7.	SMA	4	17	1	10	32
8.	SD	0	1	0	0	1
	Jumlah	62	74	37	52	225

e. Jumlah P3K Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.5 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan PPPK

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	0
3.	S1	82
4.	D4	3
5.	D3	13
6.	D1	0
7.	SLTA Sederajat	22
8.	SLTP Sederajat	0
9.	SD	1
10.	SMK	5
	Total	126

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat di bawah ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Telaahan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kepala Daerah Sumatera Selatan

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Periode 2025 - 2030 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada periode tersebut serta untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, pasangan H. Herman Deru dan H. Cik Ujang resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk masa jabatan 2025 - 2030 yang memiliki Visi sebagai berikut :

"Sumsel Maju Terus Untuk Semua"

Pemahaman terhadap visi "Sumsel Maju Terus Untuk Semua" dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ***Sumsel*** memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke- 7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 86.771,918 km2 atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.
- ***Maju*** bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- **Terus** bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.
- **Semua** mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 7 misi yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategisnya dengan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun periode 2025-2029, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yaitu penjabaran dari Misi 4 Gubernur Sumatera Selatan, dengan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, yaitu meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum;
2. Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi;
3. Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan Gedung dan Rumah;
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	89,35	90,35	92,78	95,18	97,59	100,00
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	85,01	88,8	89,6	70,8	71,8	72,8
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan tidak lepas dari kondisi nyata capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya yaitu Rencana Strategis periode 2019-2023 serta periode 2024-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan berbagai kemajuan yang berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dapat bermuara pada capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

No.	Tugas	Subtugas	Indikator Kinerja	Satuan	Target
00	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Memangkainya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	1.1 Memangkainya Akses Pelayanan Air Minum	1.1.1 Akses Air Minum layak	%	90,75
			1.1.2 Persentase Pemungutan Kebutuhan yang Terpenuhi melalui Penyediaan Air Minum Cumi-cumi Kelengkapan/Kele	%	1,70
			1.1.3 Pemantauan Cakupan Infrastruktur Perumahan (dalam Kondisi Baik)	%	75,27
		1.2 Memangkainya Akses Pelayanan Sanitasi	1.2.1 Pemantauan Cakupan Infrastruktur Perumahan (dalam Kondisi Baik)		
			1.2.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	82,41
			1.2.3 Persentase Pemungutan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	11,40
			1.2.4 Pemantauan Cakupan Drainase (dalam Kondisi Baik)	%	
			1.3.1 Pemantauan Warga Negara Kritis Berstatus yang Menempati Rumah Layak Huni	%	84,71
			1.3.2 Pemantauan Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Relokasi yang Menempati Fasilitas	%	83,31
			1.3.3 Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
			1.3.4 Pemantauan Lantai Ketinggian Rumah (2 - 15 Ha yang Diberikan)	%	13,40
			1.3.5 Pemantauan Pemukiman yang Sudah Dilengkapi RU (Perencanaan, Sertifikasi, dan Utilitas Umum)	%	50,62
			1.3.6 Pemantauan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang-orang pada Badan Hukum yang Melaksanakan Perumahan dan Pemukiman	%	26,26
			1.3.7 dan Perencanaan Rumah serta Pemantauan Perumahan, Sertifikasi dan Utilitas Umum RU		
			1.3.8 Pemantauan Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	12,86
			1.3.9 Pemantauan Pemasaran Bangunan dan lingkungan	%	31
			1.3.10 Pemantauan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi ANH	%	73
		1.4 Memangkainya Tula Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.4.1 Pemantauan Pelaksanaan Layanan Kinerja Peringkat Daerah	%	100

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2026

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak tertanggulangi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan harus diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya.

2.3 Pohon Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2026, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada pohon kinerja yang menjelaskan tentang kerangka acuan kerja. Pohon kinerja tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.4 Perjanjian Kinerja

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan target kinerja berupa kesepakatan dalam pencapaian target tahun 2026. Target kinerja tersebut digunakan sebagai ruang lingkup tugas pelaksanaan program dan kegiatan dari pimpinan instansi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yang disertai dengan indikator kinerja. Target kinerja tahun 2026 itu dituangkan didalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Indikator Kinerja dan Program Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	%	90,35
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	82,43
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68,6
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	38,00

➤ **Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Ade Irma Ningsih No. 10 Palembang, Sumatera Selatan

Email: perumahan@provinsisumatera-selatan.go.id

Telp. 321977, 3219837 Fax. 321977

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang *efektif, transparan* dan *akuntabel* serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Novian Awardani, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan,

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Pihak Pertama
Kepala Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan,

Ir. H. Novian Awardani, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan akses air minum dan sanitasi serta permasalahan akses listrik layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	%	90,35
		Akses Sanitasi Tanpa Pembiayaan / terhadap Air Minum Perumahan	%	38,00
		Rata-rata Tanpa Dengan Akses Sanitasi Layak	%	82,45
		Persentase Rata-rata Tanpa Dengan Akses Listrik Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	58,6
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Satip Urutan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	86,35

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemangjang Urutan Pemerintah Daerah	Rp 29.890.027.579	APBD
2. Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.364.740.000	APBD
3. Program Kawasan Permukiman	Rp 5.231.929.000	APBD
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp 17.175.564.024	APBD
5. Program Pengembangan Perumahan	Rp 2.384.661.707	APBD
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Rumah Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 110.000.000	APBD
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 810.526.934	APBD
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 954.058.860	APBD
9. Program Pembiayaan Bangunan Gedung	Rp 3.082.492.565	APSD
10. Program Pembiayaan Bangunan dan Landmarking	Rp 309.094.000	APSD
11. Program Pengembangan Jasa Komersial	Rp 1.429.315.445	APSD

Palembang, 21 Januari 2025

Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah



R. Herman Dena

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



H. H. Samsul Anwar, ST, M.M, IPS, AICAN Reg
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP 197511251990031004

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Peninggung Utusan Perencanaan Daerah	Persentase Penyelesaian Layanan Kinerja Peningkat Daerah	100%	Rp 29.600.917.579
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Waifu Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	84,21%	Rp 1.304.740.000
		Persentase Waifu Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemukiman yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	83,11%	
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Lusa Kawasan Kumuh 10 - 13 Ha yang Dihangus	13,4%	Rp 5.251.928.600
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pemukiman yang Sudah Dihangus PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	50,62%	Rp 17.175.304.024
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	26,86%	Rp 116.000.000
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Air Minum Layak	90,35%	Rp 818.536.934
		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyediaan Air Minum Cikal Lintas Kabupaten/Kota	1,7%	
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Perampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1,30%	Rp -
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	82,43%	Rp 994.098.865
		Persentase Pemukiman Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	11,4%	
9	Program Pengembangan Pemukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Pemukiman dalam Kondisi Baik	79,27%	Rp 2.584.661.707
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	52,86%	Rp 3.683.492.567
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	52%	Rp 550.854.530
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	73%	Rp 1.429.518.445

Tabel 2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Peningkat Kualitas Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Pemukiman Daerah	100%	Rp 29.257.725.360
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Kertih Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	84,21%	Rp 1.082.540.000
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	83,11%	
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Liris Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	15,4%	Rp 4.488.800.137
4	Program Peningkatan Pemasaran, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Pemasaran, Sarana, dan Utilitas Umum)	50,62%	Rp 20.818.537.439
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Pemasaran, Sarana dan Utilitas Umum PSU	28,86%	Rp 50.556.000
6	Program Pengelolan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Air Minum Layak	90,35%	Rp 321.623.834
		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terbyang melalui Penyediaan Air Minum Cuci Lintas Kabupaten/Kota	1,7%	
7	Program Pengembangan Sistem dan Peningkatan Persampulahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1,30%	Rp -
8	Program Pengelolan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	82,43%	Rp 909.120.275
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	11,4%	
10	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	79,27%	Rp 2.643.955.226
11	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	92,86%	Rp 461.105.308
12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	32%	Rp 558.754.530
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	73%	Rp 996.161.781

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Definisi Operasional

Penyajian indikator kinerja dalam laporan ini didasarkan pada definisi operasional yang spesifik guna menghindari ambiguitas interpretasi. Definisi operasional mencakup batasan ruang lingkup, objek yang diukur, serta periode waktu pengukuran. Hal ini dimaksudkan agar proses pengumpulan data bersifat konsisten dari tahun ke tahun, sehingga tren kinerja dapat diperbandingkan secara valid.

Adapun Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama pada dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator Akses Air Minum Layak dengan Definisi Operasional Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak) yang memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologis, dan radioaktif dihitung berdasarkan $\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Minum Kategori Layak} / \text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga} \times 100\%$;
2. Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dengan Definisi Operasional Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama (terbatas) yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dihitung berdasarkan $\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani SPAL Kategori Layak} / \text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga} \times 100\%$;
3. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan Definisi Operasional Persentase dari jumlah total rumah tangga yang memenuhi kriteria hunian yang layak (luas memadai, atap, dinding, lantai kokoh, akses air dan sanitasi layak), terjangkau, dan berkelanjutan (tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung mikroorganisme serta logam berat), sesuai standar yang ditetapkan dihitung berdasarkan $\text{Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan} / \text{Jumlah total rumah tangga} \times 100\%$;
4. Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaian dengan Definisi Operasional Persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum layak dan aman melalui sistem perpipaian (seperti PDAM) yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas air minum pemerintah atau otoritas kesehatan setempat. Kriteria kelayakannya meliputi ketersediaan air minum 24 jam per hari dan kualitas yang tidak keruh, berwarna, berbau, atau berbusa dihitung

berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan / Jumlah Seluruh Rumah Tangga x 100%;

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan indikator untuk menentukan tercapainya atau tidaknya pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Suatu perangkat daerah dapat dikatakan berhasil pada suatu program atau kegiatan apabila nilai capaian kinerjanya memenuhi target yang telah ditentukan.

Indikator kinerja yang dianalisis diuraikan menjadi 4 (empat) Indikator kinerja yang memiliki target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Indikator Kinerja yang dimaksud yaitu Akses Air Minum Layak, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Tujuan/Hasil	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan akses air minum dan sanitasi pada masyarakat dengan sumber layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	99,77%	96,09%	96,09%	Tinggi Target	Saluran Perpipaan (Supra-100%)
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	97,83%	103,72%	103,72%	Tinggi Target	Saluran Perpipaan (Supra-100%)
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	98,84%	98,75%	98,83%	Tinggi Target	Saluran Perpipaan (Supra-100%)
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	100,00%	160,34%	160,34%	Tinggi Target	Saluran Perpipaan (Supra-100%)

Tabel diatas menunjukkan perbandingan Target dan Realisasi serta capaian per indikator kinerja tahun 2026. Capaian pada TW II Tahun 2026 masih menggunakan capaian tahun 2025 karena untuk capaian tahun 2026 baru dapat dihitung pada akhir tahun. Sebagian besar Indikator Kinerja memiliki Capaian Kinerja yang sudah mencapai bahkan melebihi nilai 100%. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sebesar 103,72%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota menunjukkan kenaikan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan;
2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja sebesar 160,34%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Serta kecukupan sumber air baku, jaringan perpipaan yang luas dan terpelihara, teknologi pengolahan yang sesuai, dan tingkat kebocoran air yang rendah.

Namun, masih terdapat Indikator Kinerja dengan besaran capaian masih dibawah 100%. Indikator kinerja tersebut yaitu :

1. Akses Air Minum Layak sebesar 96,09% belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2026 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov SumSel menunjukkan bahwa beberapa kabupaten masih memiliki capaian rendah dalam pengawasan sarana air minum, yang menyebabkan kualitas air yang sampai ke rumah tangga tidak selalu masuk kategori layak meski sumbernya ada.
2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

dengan capaian kinerja sebesar 95,83%. Penurunan capaian ini dikarenakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik hunian/rumah harus memenuhi 4 kriteria sebagai hunian/rumah layak huni yaitu :

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m/kapita;
2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
4. Ketahanan bangunan yaitu atap terluas berupa beton/ganteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa marmer / granit / keramik / parket / vinyl / karpet / ubin / tegel/ teraso / kayu / papan/ semen / bata merah.

Terdapat juga program bantuan stimulan perumahan swadaya BPS yang dikenal sebagai program bedah rumah, yang fokus memperbaiki RTLH agar memenuhi kriteria ketahanan bangunan dan sanitasi serta terdapat program 3 juta rumah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2026 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tajuk Sasaran	Indikator Kinerja	2025			2026			Keterangan
			TARGET	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian	
1	Memperbaiki akses air minum dan sanitasi serta perumahan akses rumah layak, terjangkau dan terjangkau	Akses Air Minum Layak	85,00%	86,83%	97,17%	85,00%	86,83%	96,66%	Terbentuknya laporan pencapaian dari BPS sebagai pemangku awal dan DISPERKUM PTBPP ALMEST sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Sanitasi Tersedia Akses Akses Sanitasi Layak	80,00%	85,00%	100,00%	80,00%	85,00%	100,00%	Pada proses capaian pencapaian dari BPS sebagai pemangku awal dan DISPERKUM PTBPP ALMEST sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Perumahan Rumah 3 juta rumah Akses Akses Layak, Terjangkau dan Terjangkau	85,00%	85,00%	100,00%	85,00%	85,00%	95,83%	Pada proses capaian pencapaian dari BPS sebagai pemangku awal dan DISPERKUM PTBPP ALMEST sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Akses Rumah Tersedia Perumahan Terjangkau dan Terjangkau	80,00%	86,83%	100,00%	80,00%	86,83%	100,00%	Terbentuknya laporan pencapaian dari BPS sebagai pemangku awal dan DISPERKUM PTBPP ALMEST sebagai pendukung dari indikator tersebut

2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.1 Kinerja Akses Air Minum Layak Tahun 2026

Berdasarkan Grafik 3.1, target Akses Air Minum Layak tahun 2026 adalah 90,35% dengan realisasi sebesar 86,82% sehingga capaian kinerja sebesar 96,09%.

Untuk tahun 2023, 2024, 2025 dan tahun 2026 perbandingan target kinerja Akses Air Minum Layak dapat dilihat pada Grafik 3.2.



Grafik 3.2 Perbandingan Target Akses Air Minum Layak Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026

Berdasarkan Grafik 3.2, target Akses Air Minum Layak tahun 2023 adalah 86,91%, tahun 2024 adalah 88,35%, tahun 2025 adalah 89,35% dan target tahun 2026 adalah 90,35%. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak diganti menjadi indikator baru yaitu Akses Air Minum Layak sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.3.



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025 dan Akses Air Minum Layak Tahun 2026

Berdasarkan Grafik 3.3, realisasi Akses Air Minum Layak tahun 2023 adalah 87,19%, tahun 2024 adalah 87,23%, tahun 2025 adalah 86,82% dan tahun 2026 adalah 86,82%. Dalam hal ini realisasi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2025 realisasinya mengalami penurunan di bandingkan dari tahun sebelumnya, karena bidang terkait tidak melakukan survei terhadap air minum layak dan untuk realisasi pada TW II tahun 2026 masih memakai realisasi tahun 2025 karena realisasi tahun 2026 baru dapat dihitung di akhir tahun. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan hanya mendata terkait infrastruktur. Data realisasi didapat dari Badan Pusat Statistik, yang mengukur indikator air minum layak adalah Dinas Kesehatan. Solusi dan permasalahan tersebut adalah perlu ada pembahasan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan terkait mekanisme perhitungan indikator Air Minum Layak. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.4.



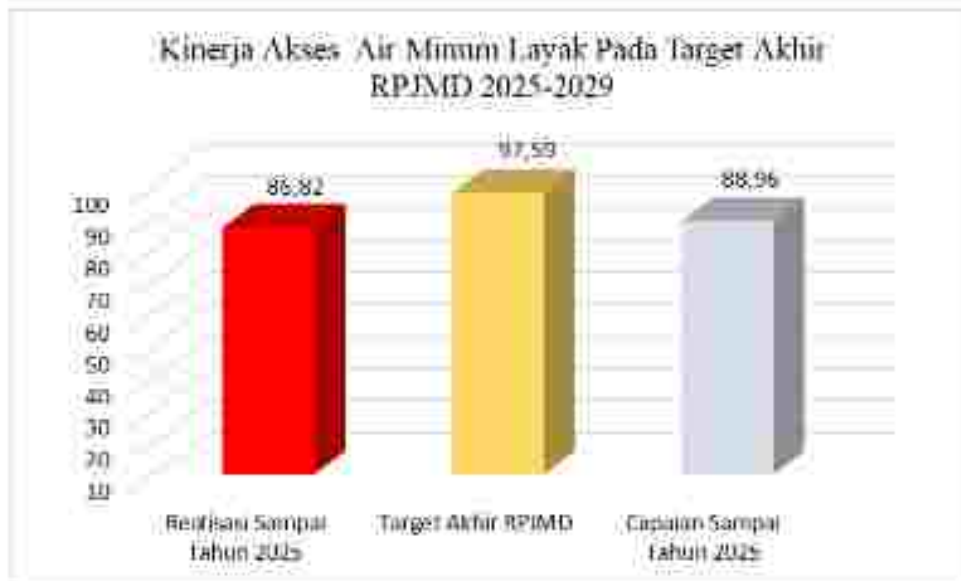
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026

Berdasarkan Grafik 3.4, capaian Akses Air Minum Layak tahun 2023 adalah 100,32%, tahun 2024 adalah 98,73%, tahun 2025 adalah 97,17% dan tahun 2026 adalah 96,09%. Dalam hal ini Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 mengalami penurunan. Penurunan capaian dikarenakan penurunan realisasi pada target di tahun 2025 dan untuk realisasi pada TW II tahun 2026 masih memakai realisasi tahun 2025 karena realisasi tahun 2026 baru dapat dihitung di akhir tahun.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2026 dapat dijabarkan pada uraian sebagai berikut:

- Perluasan SPAM JP Kecamatan Air Sugihan Kab. OKI

Adapun target Akses Air Minum Layak pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah sebesar 97,59%. Sampai tahun 2026 sudah 60 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan persentase realisasi fisik kegiatan masing-masing sebesar 100% sehingga cakupan akses air minum mencapai 86,82%. Artinya, persentase capaian pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 sejauh ini adalah sebesar 88,96%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara target akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terhadap realisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.5 Kondisi Kinerja Akses Air Minum Layak RPJMD 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan

Grafik diatas menunjukkan kondisi kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak sekarang terhadap target kondisi kinerja akhir RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Untuk mencapai target kinerja di akhir periode RPJMD 2025-2029, perlu adanya analisis pemetaan kebutuhan air minum yang terbaru agar kegiatan penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.

Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2026 adalah sebesar 100% dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2025-2045 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (Sumber: RPJMN 2025-2045). Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung tercapainya target tersebut sampai tahun 2026 adalah sebesar 86,82% dengan rincian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut grafik Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada RPJMN 2026



Pada indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak target, realisasi dan capaian tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas dengan target 82,43%, maka realisasinya adalah 85,5% dengan capaian sebesar 103,72%.

Selanjutnya, untuk perbandingan target Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2025 dan Akses Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2026 dapat dilihat pada Grafik 3.8 dibawah.



Grafik 3.8 Perbandingan Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026

Berdasarkan Grafik 3.8 target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2023 adalah 92,96%, tahun 2024 adalah 80,62%, tahun 2025 adalah 80,54% dan tahun 2026 adalah 82,43%. Dalam hal ini perbandingan target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dari tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami penurunan dan target tahun 2026 mengalami peningkatan. Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.9



Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026

Berdasarkan Grafik 3.9 realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak pada tahun 2023 80,54%, tahun 2024 adalah 77,34%, tahun 2025 adalah 85,5% dan tahun 2026 adalah 85,5. Dalam Hal ini Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dari tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan, kemudian tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 mengalami peningkatan menjadi 85,5%. Untuk realisasi pada TW II tahun 2026 masih memakai realisasi tahun 2025 karena realisasi tahun 2026 baru dapat dihitung di akhir tahun. Hal ini merepresentasikan bahwa cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan dan tiap rumah tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan secara pribadi atau bersama dengan rumah tangga tertentu (terbatas). Perhitungan capaian menggunakan data dari Badan Pusat Statistik sebagai penanggung jawab dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai pendukung dari indikator tersebut. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.10



Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023, Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026

Berdasarkan Grafik 3.10 capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2023 adalah 86,64%, tahun 2024 adalah 95,93%, tahun 2025 adalah 106,16% dan tahun 2026 adalah 103,72. Dalam Hal ini Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dari tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan menjadi 106,16% dan pada tahun 2026 mengalami penurunan karena untuk capaian pada TW II tahun 2026 masih memakai realisasi tahun 2025 karena realisasi tahun 2026 baru dapat dihitung di akhir tahun.

Adapun target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak pada akhir

periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah sebesar 88,11%. Sampai tahun 2026 ada 2 kegiatan yang akan dilaksanakan dan untuk tahun 2026 realisasi yang dipakai adalah realisasi tahun 2025 yaitu 85,5%. Artinya, persentase capaian pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sejauh ini adalah sebesar 97,03%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara target akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terhadap realisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2026 Pada Target Akhir RPJMD

Grafik diatas menunjukkan kondisi kinerja Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sekarang terhadap target kondisi kinerja akhir RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Untuk mencapai target akhir periode RPJMD 2025-2029, perlu ditingkatkan kegiatan penyelenggaraan akses sanitasi layak baik secara kuantitas dan kualitas kedepannya.

Target nasional Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak adalah sebesar 100%. Proyek prioritas strategis yang diselenggarakan pemerintah pusat untuk mencapai target tersebut adalah Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (100% Rumah Tangga). Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat (Sumber: RPJMN 2025-2045). Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung proyek prioritas strategis tersebut yaitu sebesar 85,5% sampai TW II tahun 2026 dengan rincian kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Grafik target nasional Rumah Tangga dengan

Akses Sanitasi Layak dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 3.12 Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Pada Target Nasional

Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.13 Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Tahun 2026

Berdasarkan grafik tersebut, target Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2026 sebesar 38% dan realisasi sebesar 60,93% serta capaian sebesar 160,34%. Adapun target indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan

Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2025 dan tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024 karena indikator tersebut merupakan indikator baru sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Untuk kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada akhir periode RPJMD dapat dilihat sebagai berikut.



Berdasarkan grafik tersebut, realisasi sampai tahun 2026 sebesar 60,93% dengan target akhir RPJMD 2029 sebesar 43,1% telah mencapai target akhir RPJMD dengan adanya program/kegiatan yang menunjang indikator tersebut. Sehingga didapat capaian sampai tahun 2025 sebesar 141,37%.

Target nasional Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan adalah 100% dengan realisasi capaian tahun 2026 sebesar 60,93% sehingga capaian pada standar nasional sebesar 60,93%. Grafik Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan pada standar nasional dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 3.15 Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaasan Pada Target Nasional

Kinerja indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.16 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tahun 2025 sebesar 68,6% dengan realisasi sebesar 65,74% dan capaian sebesar 95,83%. Adapun target indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024 karena indikator tersebut merupakan indikator baru

sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025. Untuk kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan pada target akhir RPJMD 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Berdasarkan grafik tersebut, realisasi sampai tahun 2026 sebesar 65,74% dengan target akhir RPJMD 2029 sebesar 71,6% dan capaian sampai tahun 2025 sebesar 91,82%.

Target nasional Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan adalah 67% dengan realisasi tahun 2026 sebesar 65,74% sehingga capaian yang didapat adalah 98,12%. Grafik capaian kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dapat dilihat sebagai berikut:



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 terhadap Target Akhir Renstra

2025-2030

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 1 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel 3.4 yang merupakan kemajuan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tejuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2026 TWII	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
1.	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta tersedianya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	96,09%	100%	96,09
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	103,72%	90%	115,24
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	95,83%	72,6%	132,00
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Bersih	180,34%	43,20%	371,16

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan Standar Nasional

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja instansi adalah membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional. Adapun data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dari Pemerintah Pusat terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Penyandingan realisasi kinerja tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2026 TW II	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	86,82%	100%	86,82%
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	85,55%	100%	85,50%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,74%	67%	98,12%
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	60,93%	100%	60,93%

Berdasarkan tabel data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian Akses Air Minum Layak masih dibawah target nasional hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, keterbatasan ketersediaan sumber air baku yang memenuhi standar kualitas, terutama pada wilayah tertentu yang mengalami tekanan terhadap sumber daya air. Kedua, belum optimalnya infrastruktur penyediaan air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Ketiga, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan air minum yang memenuhi standar kesehatan.
2. Persentase capaian rumah tangga dengan akses sanitasi layak masih dibawah target nasional dikarenakan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi layak dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan belum optimalnya pembangunan sarana sanitasi mandiri seperti jamban sehat. Ketiga, belum meratanya infrastruktur pendukung sanitasi, termasuk sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai;
3. Realisasi indikator akses hunian layak pada TW II tahun 2026 ini tercatat sebesar 65,74 %, sehingga terdapat gap sebesar 1.26 % terhadap target nasional. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya intervensi melalui program stimulan, capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan hunian layak di wilayah provinsi masih memerlukan akselerasi yang lebih masif untuk mengejar ketertinggalan terhadap pemenuhan hunian layak di tingkat nasional.
4. Realisasi akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan pada TW II tahun 2026 tercatat sebesar 60.93 %. Angka ini menunjukkan adanya selisih (gap) sebesar 39.07

% dari Target Nasional yang telah ditetapkan dalam roadmap Universal Access. Meskipun terdapat pertumbuhan jumlah sambungan rumah (SR) baru secara absolut, namun secara persentase, laju penyediaan layanan belum mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan populasi di kawasan perkotaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative Solusi

Analisis penyebab keberhasilan kinerja pada tahun 2026 dibagi menjadi empat indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja indikator 100% atau keatas. Empat indikator kinerja tersebut adalah Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani, Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU, Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak.

Adapun analisis penyebab kegagalan kinerja pada tahun 2026 dibagi menjadi dua indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja dibawah 100%. Dua indikator kinerja tersebut adalah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani.

Penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi pada indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini

Selain keberhasilan dan kegagalan pada indikator, terdapat juga analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan Utama	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Meningkat/Tidak Meningkat
1	Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi serta hygiene di desa termiskin, terbelakang dan terdampak	Akses Air Bersih Layak	88,82%	Tidak ada capaian, tidak ada dengan RPS sebagai pemangkas jaring. Sedangkan DESPERS 214 Pers. Satisfaitunya sebagai pendamping	-	87,12%	Meningkat
		Berat Tenggulung Anak Satisfaitunya	85,25%	Tidak ada capaian, tidak ada dengan RPS sebagai pemangkas jaring. Sedangkan DESPERS 214 Pers. Satisfaitunya sebagai pendamping	-	86,30%	Meningkat
		Prevalensi Berat Tenggulung Anak Satisfaitunya	85,70%	Tidak ada capaian, tidak ada dengan RPS sebagai pemangkas jaring. Sedangkan DESPERS 214 Pers. Satisfaitunya sebagai pendamping	-	88,12%	Meningkat
		Akses Berat Tenggulung Perempuan Satisfaitunya	85,88%	Tidak ada capaian, tidak ada dengan RPS sebagai pemangkas jaring. Sedangkan DESPERS 214 Pers. Satisfaitunya sebagai pendamping	-	87,21%	Meningkat

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja					Anggaran			
No	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Target Efisiensi
1	Meningkatkan akses air minum dan sanitasi serta terjangkau bagi masyarakat tingkat, menengah dan berpendapatan rendah	90,11%	86,32%	96,00%	Rp. 221.822.234	Rp. 19.782.508	8,98	20,11
		92,61%	85,3%	103,72%	Rp. 900.120.278	Rp. 4.389.500	0,50	20,45
		68,68%	65,74%	95,87%	Rp. 4.489.500.187	Rp. 434.007.409	11,00	20,20
		16,00%	16,68%	104,32%	Rp. 482.704.188	Rp. 10.782.508	2,25	27,15

Untuk pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja					Anggaran			
No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Target Efisiensi
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Rp. 28.287.728.860	Rp. 12.568.295.757	44,46	27,04
2	Program Pengembangan Perumahan	29,11%	100%	118,78%	Rp. 1.082.840.000	Rp. 44.000.000	4,06	20,24
		29,11%	100%	100,00%				
3	Program Kawasan Permukiman	11,4%	14,12%	106,04%	Rp. 4.489.500.187	Rp. 434.007.409	11,00	20,20
4	Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Utilitas Umum	50,62%	40,34%	79,69%	Rp. 20.818.587.458	Rp. 328.132.504	1,58	27,47
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	28,98%	11,36%	39%	Rp. 80.298.000	Rp. 2.298.700	2,87	20,21
6	Program Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	50,55%	55,82%	96,09%	Rp. 221.822.234	Rp. 11.434.598	5,16	20,24
		5,7%	5,8%	98,36%				
7	Program Pengkajian dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22,45%	22,80%	101,73%	Rp. 900.120.278	Rp. 4.389.500	0,50	20,45
		11,4%	4,33%	37,95%				
8	Program Pengembangan Permukiman	76,07%	78,85%	98,18%	Rp. 1.943.985.128	Rp. 88.505.170	4,56	20,81
9	Program Pemataan Bangunan Gedung	52,58%	52%	100,92%	Rp. 481.128.508	Rp. 45.512.100	9,46	20,58
10	Program Pemataan Bangunan dan Lingkungan	10%	51%	76,55%	Rp. 558.784.500	Rp. 100.008.120	17,90	20,10
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	72%	87%	119,18%	Rp. 298.180.781	Rp. 124.898.000	41,87	20,43

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka terselenggaranya program yang mendukung indikator kinerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi Penggunaan Sumber Daya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Adapun persentase efisiensi biaya program yang mendukung indikator kinerja TW II Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.10 Persentase Efisiensi Biaya Program yang Mendukung Indikator Kinerja TW II Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 29.257.725.360	Rp 12.569.295.757	42,96
2.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.082.840.000	Rp 44.000.000	4,06
3.	Program Kawasan Permukiman	Rp 4.489.800.137	Rp 494.027.409	11,00
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp 20.818.537.439	Rp 526.152.524	2,53
5.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp 50.356.000	Rp 3.356.700	6,67
6.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 321.673.834	Rp 12.414.998	3,86
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 909.120.275	Rp 4.969.500	0,55
8.	Program Pengembangan Permukiman	Rp 2.643.955.226	Rp 89.505.570	3,39
9.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 461.105.308	Rp 43.510.100	9,44
10.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 558.754.530	Rp 100.006.150	17,90
11.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 996.161.781	Rp 194.996.082	19,57

Berdasarkan Tabel 3.10 realisasi biaya untuk keseluruhan program pada tahun 2026 sebesar Rp. 14.082.234.790,- adapun target biaya adalah Rp. 61.589.979.890,-. Dengan rumus efisiensi diatas, didapat efisiensi keseluruhan program pada tahun 2026 sebesar 11,08% Persentase efisiensi ini tergolong rendah sehingga bisa diasumsikan secara umum penggunaan sumber daya biaya belum terefisiensi dengan baik.

Adapun dilihat dari level setiap program, program yang memiliki efisiensi sumber daya paling besar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan efisiensi sebesar 19%. Hal ini dikarenakan program tersebut dimunculkan untuk menunjang kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun untuk program-program lainnya, efisiensi dapat dilakukan melalui pelibatan multipihak dalam pelaksanaan kegiatan seperti pelibatan pihak ke-3, kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi vertikal, pihak swasta atau lembaga terkait dalam penggunaan tenaga ahli, tim penilai, narasumber serta dalam pembantuan pelaksanaan kegiatan. Efisiensi juga dilakukan dengan penggunaan sarana dan prasarana penunjang kerja secukupnya.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja TW II Tahun 2026 adalah sebanyak 11 Program dan 24 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 321.623.834,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.414.998,- dengan realisasi fisik sebesar 4,74% dan realisasi keuangan sebesar 3,86% yang diarahkan untuk menerapkan lingkungan yang sehat pada permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 18 lembaga, Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 17 kabupaten/kota

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 909.120.275,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.969.500,- dengan realisasi fisik

sebesar 0,55% dan realisasi keuangan sebesar 0,55%, yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun sebanyak 2 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 17 kabupaten/kota.

3) Program Pengembangan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.643.955.226,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 89.505.570,- dengan realisasi fisik sebesar 17,56% dan realisasi keuangan sebesar 3,39%, yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi sebanyak 100 SR, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar sebanyak 50 rumah tangga.

4) Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 461.105.308,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 43.510.100,- dengan realisasi fisik sebesar 9,49% dan realisasi keuangan sebesar 9,44%, yang diarahkan untuk menata bangunan gedung dan aset di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan sebanyak 1 bangunan gedung cagar budaya; Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang sebanyak 5 lisensi; Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebanyak 17 Kab/Kota; Jumlah Dokumen Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi sebanyak 1 dokumen.

5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 558.754.530,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 100.006.150,- dengan realisasi fisik sebesar 17,93% dan realisasi keuangan sebesar 17,90%, yang diarahkan untuk menata bangunan dan lingkungan strategis dan aset provinsi di Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota yang Disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 17 Kab/Kota.

6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 996.161.781,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 194.996.082,- dengan realisasi fisik sebesar 34,58% dan realisasi keuangan sebesar 19,57%, yang diarahkan untuk mengembangkan jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih sebanyak 125 orang; Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 2 lembaga; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi sebanyak 70 orang; Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya sebanyak 1 lembaga; Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan sebanyak 1 layanan informasi; Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan sebanyak 1 perangkat pendukung; Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 8 orang; Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha sebanyak 1 badan usaha.

7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.257.725.360,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.569.295.757,- dengan realisasi fisik sebesar 43,04% dan realisasi keuangan sebesar 42,96%, yang diarahkan untuk administrasi perkantoran dalam mendukung terselenggaranya urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 2 dokumen; Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 2 laporan; Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 laporan; Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat sebanyak 1 Data; Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah sebanyak 1 Berita Acara; Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembianguan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan sebanyak 1 Berita Acara; Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan sebanyak 249 orang; Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 1 dokumen; Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 1 paket, Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 10 orang, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan sebanyak 30 orang, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 22 unit roda empat dan 6 unit roda 2, Jumlah Mebel yang Dipelihara sebanyak 1 unit, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit, Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan sebanyak 1 unit kerja.

8) Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.082.840.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 44.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 16,60% dan realisasi keuangan sebesar 4,06%, yang diarahkan untuk melaksanakan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani sebanyak 1 dokumen; Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi sebanyak 1 dokumen; Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih sebanyak 2 orang; Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan sebanyak 100 orang; Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi sebanyak 1 unit rumah; Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun sebanyak 1 unit rumah; Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun sebanyak 1 unit rumah; Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan sebanyak 1 laporan.

9) Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.489.800.137,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 494.027.409,- dengan realisasi fisik sebesar 25,60% dan realisasi keuangan sebesar 11%, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan utilitas umum di kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi sebanyak 1 dokumen, Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara sebanyak 1 sistem informasi, Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina sebanyak 7 kelompok masyarakat, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 laporan, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki sebanyak 7 unit rumah, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali

Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 laporan, Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 3 unit rumah, Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 dokumen, Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan sebanyak 1792,28 Ha, Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar sebanyak 1792,28 Ha.

10) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.818.537.439,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 526.152.524,- dengan realisasi fisik sebesar 2,53% dan realisasi keuangan sebesar 2,53%, yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan PSU di kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman sebanyak 10 dokumen, Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman sebanyak 10 lokasi, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman sebanyak 1 laporan.

11) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.356.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.356.700,- dengan realisasi fisik sebesar 6,72% dan realisasi keuangan sebesar 6,67%. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah sebanyak 1 laporan.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Anggaran terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja

Modal. Pagu anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3.11 menunjukkan Realisasi Keuangan Belanja Operasi untuk tahun 2026 Triwulan II sebesar 23,29%. Realisasi keuangan belanja operasi belum mencapai 100% karena disebabkan masih dalam tahap perencanaan/persiapan lelang. Untuk Belanja Modal, Realisasi Keuangannya sebesar 0% dikarenakan sebagian besar alokasi anggaran merupakan belanja kurang bayar tahun anggaran 2025 yang baru dianggarkan melalui pergeseran APBD. Sesuai rencana anggaran kas (RAK), realisasi anggaran tersebut direncanakan pada Triwulan III. Adapun untuk realisasi fisik belum mencapai 100% dikarenakan terdapat program/kegiatan yang belum terlaksana. Sehingga Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebesar 9,05% dengan Realisasi Fisik sebesar 9,07%.

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Akhir Tahun	Realisasi Triwulan II	Target Akhir Tahun	Realisasi Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	61.589.979.890	14.082.234.790	100	22,86	100	25,05
Belanja Operasi	60.438.843.701	14.082.234.790	-	-	-	-
Belanja Modal	1.151.136.189	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

Uraian rinci mengenai realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Total Belanja

Realisasi keuangan Total Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 14.082.234.790,- atau 22,86% dan realisasi fisik 25,05%

2. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi keuangan Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 14.082.234.790,-

3. Realisasi Belanja Modal

Realisasi keuangan Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 0,-.

Adapun realisasi keuangan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1.1 Meningkatkan Akses Pelayanan Air Minum	Program Penguasaan dan Pengembangan Sistem Perpipaan Air Minum	221.923.334	9,88	21.954.998
			Program Pengembangan Permukiman	2.942.950.226	3,50	82.920.170
		1.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Sanitasi	Program Pengembangan Permukiman			
			Program Penguasaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	300.120.273	0,00	4.289.400
	1.3 Meningkatkan Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah		Program Pengembangan Perumahan	1.082.940.000	4,08	44.000.000
			Program Kawasan Permukiman	4.488.800.187	11,00	494.027.408
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20.818.037.400	0,00	938.182.834
			Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.588.000	9,97	2.288.700
			Program Pemetaan Bangunan Gedung	481.108.000	9,44	45.520.100
			Program Pemetaan Bangunan dan Lingkungannya	355.194.830	27,80	100.006.180
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	290.381.761	25,07	104.590.000
			Program Peningkat Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.287.725.000	42,98	12.980.289.757

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindak lanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam LKjIP ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kinerja yang baik dalam memenuhi target indikator dalam Rencana Strategis 2025-2029. Walaupun masih ada indikator yang realisasi capaiannya masih dibawah 100%. Adapun indikator terbut dijabarkan sebagai berikut :

1. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sebesar 103,72%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota menunjukkan kenaikan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan;

2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja sebesar 160,34%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Serta kecukupan sumber air baku, jaringan perpipaan yang luas dan terpelihara, teknologi pengolahan yang sesuai, dan tingkat kebocoran air yang rendah.

Namun, masih terdapat Indikator Kinerja dengan besaran capaian masih dibawah 100%, Indikator kinerja tersebut yaitu :

1. Akses Air Minum Layak sebesar 96,09% belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2026 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov SumSel menunjukkan bahwa beberapa kabupaten masih memiliki capaian rendah dalam pengawasan sarana air minum, yang menyebabkan kualitas air yang sampai ke rumah tangga tidak selalu masuk kategori layak meski sumbernya ada.
2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan capaian kinerja sebesar 95,83%. Penurunan capaian ini dikarenakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik hunian/rumah harus memenuhi 4 kriteria sebagai hunian/rumah layak huni yaitu :
 1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m/kapita;
 2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
 3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
 4. Ketahanan bangunan yaitu atap terluas berupa beton/ganteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa marmer / granit / keramik / parket / vinil / karpet / ubin / tegel/ teraso / kayu / papan/ semen / bata merah.

Terdapat juga program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang dikenal sebagai program bedah rumah, yang fokus memperbaiki RTLH agar memenuhi kriteria ketahanan bangunan dan sanitasi serta terdapat program 3 juta rumah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah.

4.1 Langkah Strategis

1. Perlu ada pembahasan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan tetap melaksanakan program bedah rumah untuk meningkat kualitas RTLH, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan melakukan penyediaan infrastruktur dasar serta melaksanakan kerjasama dengan CSR.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan pembangunan dan menyelenggarakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman. Program ini berfungsi sebagai peta jalan untuk memastikan pembangunan infrastruktur sanitasi di setiap kabupaten/kota terukur dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PDAM dalam tata kelola layanan air, memperluas jaringan perpipaan ke kawasan perkotaan yang belum terlayani serta menurunkan tingkat kebocoran air untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Dengan bekal keikhlasan, tekad dan kerja keras serta rasa kebersamaan dari berbagai pihak yang terkait akan mampu memenuhi pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik lagi dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang keciptakaryaan.

Akhirnya dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan TW II Tahun 2026 sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dimasa mendatang.

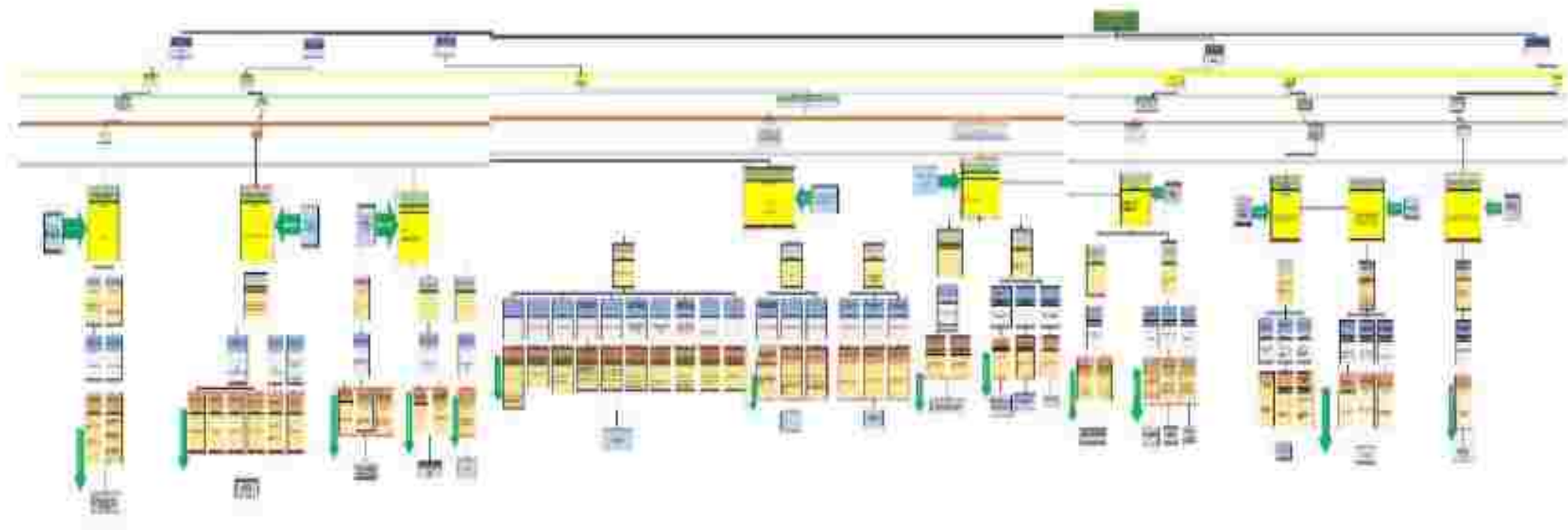
Palembang, 02 Juli 2026

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. H. Novian Swardani, ST., M.M., IPM., ASEAN.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

LAMPIRAN 1



LAMPIRAN 2

